



## PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Dicky Djatnika Utama

### ABSTRACT

*Poverty is a condition in which a person or a group either male or female can not get their rights in order to survive and develop their human dignity. One of the solutions to remove poverty is through education. By getting education, people can develop their human capital. Good education gives people knowledge and skills in order to be more productive. Indonesian government, as stated in the 1945 Constitution, has carried out various things in increasing the participation of its people in education. The government has allocated more than 20 trillion as the state budget education. It is expected that such education can result in qualified human resources in various disciplines because education can become a strong foundation for two main pillars in removing poverty:(1) sustainable growth of economics that sides with poor people and (2) community welfare-oriented social development. Moreover, the government has taken some steps in order to expand the opportunity of educational access and distribution.*

**Keywords :** *poverty, poor people, education*

### A. PENDAHULUAN

Memperhatikan akibat pertumbuhan kemiskinan bersama-sama dengan prestasi pembangunan yang positif sifatnya, komunitas global menetapkan 1996 sebagai tahun Internasional untuk pemberan-

atasan kemiskinan. Sebelumnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang pembangunan sosial telah dilaksanakan untuk mendiskusikan upaya pengurangan dan penurunan kemiskinan, perluasan pekerjaan produktif dan pengembangan integrasi sosial. Perkembangan ini ditindaklanjuti dengan proklamasi pada tahun 1997-2006 sebagai dasawarsa

---

Alamat Korespondensi:  
MAP UNDIP  
Telp.:024-8452791  
Email:mapdialogue@yahoo.com

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pemberantasan Kemiskinan dengan tema **"Memberantas Kemiskinan merupakan tugas, etik, sosial, politik dan ekonomi dari kemanusiaan yang mendesak"**

Sejalan dengan tema tersebut melalui makalah ini penulis akan mencoba mengulas bagaimana pentingnya peranan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi akut antara 1997-1999 angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 23,4%, bahkan meningkat setelah pemerintahan baru berulang kali menaikkan harga BBM. Sepertinya kemiskinan menjadi masalah krusial yang melilit bangsa kita tercinta ini.

Berdasarkan data BPS (2006), jumlah penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, yakni mereka yang hidup hanya dengan penghasilan sebesar US\$ 1,55 per hari sebanyak 17,75% atau sekitar +/- 39,05 juta orang. Bahkan menurut Bank Dunia, bila ukuran penghasilan dinaikkan sedikit saja menjadi US\$ 2, penduduk yang tergolong miskin mencapai 49% atau lebih dari 100 juta orang, sungguh ironis dengan kondisi demikian,

maka masalah kemiskinan di Negara berkembang seperti Indonesia menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian lebih.

Kemiskinan sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda, dan tergantung pada perspektif yang digunakan, maka batasan kemiskinan juga begeser. Dengan menggunakan pandangan kuantitatif dan materialistik, maka kemiskinan telah dibataskan sebagai "ketidakmampuan untuk meraih standard hidup minimal". Standard pengukuran yang digunakan untuk menilai standard hidup, termasuk barang-barang rumah tangga dan pengeluaran per kepala dan juga dimensi kesejahteraan lain, seperti kesehatan, gizi, harapan hidup, kematian balita, keaksaraan dan tingkat pendaftar disekolah serta akses pada barang-barang umum atau sumber kekayaan umum.

Menurut definisi baru, kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack Of knowledge and skills*) dan

kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*). (Alhumani, 2006), atau *human capability* (Sen, 2000). Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.

Terkait dengan pendidikan, serta sejalan dengan tujuan didalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dimana Indonesia-pun telah ikut menandatangani pada september 2002. Sebagai sebuah pedoman, MDGs sesungguhnya sangat berhubungan dengan pemenuhan hak dasar warga negara (*right based approach*) yang dapat dilihat berdasarkan indikator MDGs yang didasarkan pada *Human Development Index* (HDI) yang mencerminkan sejauh mana negara mampu memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Membahas peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan harus diarahkan *human capability* (Sen, 2000), tentu hal inipun sejalan dengan salah satu tujuan MDGs pada tahun 2015 yang menargetkan

pendidikan untuk semua (*Education For All*, EFA) dimanapun, laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Empat indikator yang digunakan yaitu angka melek huruf (*literacy rate*), angka partisipasi sekolah (*school enrollment ratio*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan rasio murid laki-laki dan perempuan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan

Peranan pendidikan di dalam pengentasan kemiskinan telah merupakan kajian dari para ahli ekonomi seperti Amartya Sen dan Jeffrey Sachs. Mengapa kemiskinan masih terus berlarut di banyak negara berkembang terutama di Indonesia? Menurut Amartya Sen hal ini berkaitan dengan kemerdekaan yang dibatasi. Kemerdekaan individu yang terpasung karena sistem politik menyebabkan rakyat banyak tidak dapat menyuarakan penderitaannya. Rakyat banyak tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan apa yang disebut depresiasi dari potensi kemampuan rakyat/

*capability deprivation* (Sen, 2000:chapter IV).

Pemasungan kapasitas untuk mengembangkan diri merupakan pemasung terhadap kemampuan manusia (*human capability*) sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Strategi Timur menurut (Sen, 2000:40) merupakan strategi yang sangat mementingkan modal manusia (*human capital*) di dalam pembangunan manusia. India dan Cina sangat mementingkan pengembangan kemampuan manusia. Bagaimana kaitan antara pendidikan dan penuntasan kemiskinan? Menurut Jeffrey Sachs di dalam bukunya *The End of Proverty* salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005:245-265). Filosofis Amartya Sen, paham libertarianisme Nosick dan Jeffrey Sachs mengemukakan enam paket penuntasan kemiskinan, yaitu : 1) Kapital manusia (*human capital*) terutama dalam kesehatan, gizi, dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. 2) Kapital bisnis (*business capital*), sarana-sarana yang diperlukan

di dalam transportasi untuk pertanian, industri dan servis. 3) Infra-struktur: jalan, tenaga listrik, air minum. Sanitasi, dsb. 4) Kapital alamiah (*natural capital*) berupa tanah pertanian, biodiversitas. 5) Kapital lembaga-lembaga publik seperti hukum dagang, hukum peradilan, pelayanan pemerintah. 6) Kapital ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) berupa *know how* ilmu dan teknologi yang meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan *natural capital*. Pendekatan ekonomis ini melihat masalah pendidikan sebagai sarana untuk peningkatan produktivitas. Dua hal yang perlu dicatat di dalam pemikiran Amartya Sen dan Jeffrey Sachs. Pertama ialah pentingnya kemerdekaan dalam pengembangan pribadi manusia. Proses pendidikan yang memenjarakan kemerdekaan pribadi atau tidak mengembangkan kemampuan seseorang tentunya tidak dapat diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Kemiskinan menurut Sen bukan hanya dalam arti ekonomis tetapi juga kemiskinan politis, kemiskinan pendidikan, kemiskinan kesehatan. Pendidikan untuk pemerdekaan manusia

(konsep pendidikan Paulo Freire, filsuf dan ahli pendidikan Brasil) sangat sesuai dengan konsep Amartya Sen. Kedua, penuntasan kemiskinan bukan hanya dapat dicapai melalui pengembangan satu sektor tertentu saja tetapi berbagai sektor penting yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Salah satu program yang penting ialah pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, paling kurang untuk jenjang pendidikan dasar. Bahkan Deklarasi HAM PBB 1948 menyebut pendidikan merupakan hak asasi manusia

yang wajib dipenuhi oleh setiap negara. Karena itu penyediaan akses pada pendidikan, khususnya pendidikan dasar sudah menjadi komitmen dikalangan komunitas internasional sebagaimana tercemin didalam World Summit for Sosial Development di Kopenhagen tahun 1995 dan World Education Forum di Dakar Tahun 2000.

## **2. Strategi Kunci Kurangi Kemiskinan**

Untuk memenuhi komitmen global tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang selama ini tidak bisa sekolah atau drop out karena berbagai alasan.

Pemerintah berusaha meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga masyarakat, sehingga hak dasar mereka dapat dipenuhi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kita patut bersyukur, secara umum partisipasi pendidikan yang antara lain diukur dengan indikator angka partisipasi sekolah (APS) meningkat dalam kurun waktu lebih dari satu decade terakhir.

Menurut Susenas (2004), APS usia penduduk usia 7-12 tahun meingkat dari 92,83%

pada 1993 menjadi 96,77% pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama, APS penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 68,74% menjadi 83,49%. Sedangkan APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 40,23% menjadi 53,48%. Selain masalah kesenjangan partisipasi pendidikan, kita juga masih menghadapi masalah lain yakni tingginya angka putus sekolah. Menurut susenas 2004, jumlah absolute anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi (*drop out*) pada kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebanyak 360.692 orang, kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 2.006.507 orang, dan kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 5.707.718 orang. Masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relative besar.

Keluarga miskin, akan kehilangan sumber pendapatan bila anak-anak mereka pergi ke sekolah. Terjadi *forgone earning*

yakni nilai pendapatan (uang) yang mungkin diperoleh dengan memperkejakan anak, namun hilang karena harus sekolah. Data Susenas (2003) menunjukkan, alasan utama anak-anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah karena tidak ada biaya (67,0%) dan harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga (8,7%). Jadi, kesulitan ekonomi (75,7%) menjadi masalah mendasar sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa meneruskan pendidikan.

Konteks ini, membuktikan pendidikan merupakan medium tentang bagi upaya mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar. Hal itu diyakini sebagai tali simpul untuk mengurangi benang kusut masalah kemiskinan. Upaya membangun pendidikan bermutu yang dimulai dari pendidikan dasar ini didasarkan pada dua pertimbangan penting. Pertama, pendidikan dasar akan melahirkan dan meningkatkan jumlah penduduk melek huruf *to produce a literate and numerate population*.

Selain itu, jumlah penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun sangat besar yakni sekitar 27,3 juta dan menjadi lebih banyak lagi bila ditambah dengan kelompok umur 13-15 tahun yakni sekitar 12,7 juta (BPS-Susenas 2004).

Penduduk usia sekolah memerlukan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu agar dapat *survive* dalam menjalani kehidupan di masa depan. Kedua, pendidikan dasar merupakan kerangka landasan bagi pendidikan lanjutan *to lay the ground work for further education*. Pendidikan dasar memberi sumbangan sangat besar, bahkan menentukan, dalam menyiapkan anak-anak untuk mengembangkan segenap potensi dan kemampuan mereka guna mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Peningkatan pelayanan pendidikan lanjutan, khususnya sekolah menengah atas, harus menjadi agenda nasional yang mendesak pula. Karena, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun direncanakan tuntas pada tahun 2008.

Dengan membangun landasan pendidikan yang kokoh diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas, sehingga

dapat membantu menyelesaikan permasalahan utama bangsa. Sebab, pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin, dan 2) pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dan harus ditopang dengan tenaga kerja terdidik, yang punya pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Pembangunan sosial hanya dapat berlangsung dengan baik bila berfokus pada *human investment* yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, yang merupakan elemen pokok dalam membangun masyarakat sejahtera.

Kita semua menyadari betapa kemiskinan menjadi problem akut, yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh, terencana, dan berjangka panjang untuk mengatasinya. Pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena pendidikan memberi bekal pengetahuan dan

keterampilan bagi setiap warga masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Negara harus mampu menyediakan layanan pendidikan kepada setiap warganya secara merata dan adil. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi *social catastrophe* yang membuat kehidupan masyarakat makin jauh dari sejahtera.

Konsep peranan pendidikan dalam upaya pengentasan kemiskinan bukan sekedar sebagai isu belaka namun secara langsung dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada padat saat ini. Oleh karena itu perspektif program yang tepat adalah mengembangkan pilar-pilar penguatan program kegiatan pengentasan kemiskinan yang bersandar pada pentingnya peranan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan.

Konsep konkret yang dapat diwujudkan adalah dengan memperluas akses, meningkatkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga diharapkan dengan adanya program secara berkelanjutan dapat mengentaskan

serta mengurangi kemiskinan secara bertahap.

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembanguanan pendidikan secara berkesinambungan, untuk itu perlu upaya-upaya sistematis dalam melaksanakan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan mentargetkan Angka Partisipasi Murni (APM-SD) hingga 95%, dan memperluas akses SMP/Mts hingga Angka Partisipasi Kasar (APK-98%) serta berupaya keras menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5% hal ini tidak saja bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan namun juga beorientasi kearah peningkatan kapasitas penduduk/masyarakat untuk dapat belajar sepanjang hayat serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia. (IPM).

Pemerintah saat ini yang telah mencanangkan pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini memerlukan pelayanan pendidikan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi

dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan dan daerah terpencil), dalam kaitan ini pemerintah perlu membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/ SMPLB yang diprediksikan masih besar jumlahnya untuk memperoleh layanan pendidikan, disamping itu perlu juga dilakukan langkah yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Langkah-langkah pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut meskipun tidak berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan seseorang, sebagai hak-hak dasar bagi masyarakat miskin, pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal terpenting. Kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi dalam masyarakat hanya dapat diperoleh ketika aset berupa modal materiil tidak di miliki.

Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (*education for all*) seperti target MDGs dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di tanah tercinta Indonesia.

## 2. Saran

- a. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 0-6, 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan pada setiap jenjang yang dijalani
- b. Memberikan bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pemanfaatan Biaya Operasional Sekolah,

untuk tujuan tersebut dengan memperhitungkan siswa miskin serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.

- c. Membentuk SD-SMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambah ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya (*catchment areas*) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.
- d. Memperluas akses bagi yang belum terlayani jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan jalur pendidikan nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa., disamping itu perlu pula mengembangkan SMP

- terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.
- e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan para pemangku kepentingan pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serati PT.
  - f. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai kebutuhan dan keunggulan lokal dengan menambah program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang serta perlu dilakukan penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
  - g. Memperluas daya tampung PT yang ada dengan memberikan fasilitasi pada perguruan tinggi untuk membuka program-program keahlian yang dibutuhkan masyarakat dan mengalih-fungsikan atau menutup sementara secara fleksibel program-program yang lulusannya sudah jenuh.

## DAFTAR PUSTAKA

Delors, Jacques, et al. 1998. *Learning: The Treasure Within*, Report to Unesco of The International Commission on Education for Twenty First Century. Paris: Unesco.

Alhumani, Amich. 2006. *Media Indonesia*. 21 Desember.

Olssen, Mark; John Codd; Anne-Marie O'Neil (ed). 2004. *Education Policy, Globalization, Citizenship & Democracy*. London: Sage Publication.

Natan's Blog Thinking and feeling- April 2009.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

- Phenix, Philip H. *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum of General Education*, New York: Mc Graw Hill Book, 1964.
- Redja, Nuhdyahardjo. 2004. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Richard, Samuels. 2002. Nativism in Cognitive Science, *Journal Mind & Language*, vol.17, pp.233-265. Oxford: Blackwell.
- Robert, Brumbaugh S. & Nathaniel M. Lawrence. 1963. *Philosopher on Education*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009
- Sach, Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty*. New York: Penguin Press.
- Scheffler, Israel. 1971. *Reflection on Educational Relevance*, dalam buku *Curriculum : Reading in The Philosophy of Education*. Urbana : University of Illinois Press.
- Siler, Todd. 1990. *Breaking the Mind Barrier*. USA: Simon & Schuster.
- Sen, Amartya Kumar. 2000. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional